

## **PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**Sri Wati**

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

[Sriwati@iaidu.kandangan.ac.id](mailto:Sriwati@iaidu.kandangan.ac.id)

### **Abstrak**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional, merusak tata kelola pemerintahan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif jangka panjang melalui pendidikan, khususnya pendidikan karakter berbasis nilai. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, moralitas, dan tanggung jawab sosial, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi kepada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan pendidikan anti-korupsi melalui pembelajaran PKn dengan menggunakan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga pendidikan dan organisasi anti-korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi kata kunci, penelusuran literatur, seleksi sumber kredibel, dan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, dan keadilan dapat diintegrasikan ke dalam materi PKn secara eksplisit maupun implisit. Strategi penerapan dapat dilakukan melalui pendekatan tematik, studi kasus, diskusi kelas, dan proyek berbasis nilai. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan modul pembelajaran tematik antikorupsi, minimnya pelatihan guru dalam membawakan materi nilai, serta kurangnya evaluasi pembelajaran yang menekankan aspek afektif dan karakter. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan pendidikan nasional yang mendukung integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam PKn, penyusunan bahan ajar yang relevan dan kontekstual, serta peningkatan kapasitas guru sebagai agen perubahan. Kajian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan pendidikan karakter dan strategi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci : pendidikan anti-korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan.

### **Abstract**

Corruption is one of the most serious issues hindering national development, undermining government governance, and weakening public trust in state institutions. Efforts to combat corruption cannot rely solely on repressive approaches through law enforcement but also require long-term preventive strategies through education, particularly character education based on values. Civic Education (PKn) as a subject that instills the values of democracy, morality, and social responsibility, plays a strategic role in embedding anti-corruption values in students. This study aims to comprehensively examine the implementation of anti-corruption

education through Civic Education learning using a library research method. Data were obtained from various literature sources such as academic books, national and international scientific journals, official government documents, and publications from educational institutions and anti-corruption organizations. Data collection techniques included keyword identification, literature search, selection of credible sources, and content analysis. The findings indicate that values such as honesty, integrity, responsibility, empathy, and justice can be integrated into Civic Education materials both explicitly and implicitly. Implementation strategies can be carried out through thematic approaches, case studies, classroom discussions, and value-based projects. However, challenges remain, such as the limited availability of thematic anti-corruption learning modules, the lack of teacher training in delivering value-based content, and insufficient assessment of affective and character aspects. Therefore, it is necessary to strengthen national education policies that support the integration of anti-corruption values in Civic Education, develop relevant and contextual teaching materials, and enhance teacher capacity as agents of change. This study is expected to serve as a reference for the development of character education and early corruption prevention strategies in educational environments. Keywords: Anti-corruption education, Civic Education

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan supremasi hukum, dan menghambat pembangunan nasional. Di Indonesia, praktik korupsi telah menjadi masalah struktural dan kultural yang sulit diberantas hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurut laporan Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada angka yang rendah, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum berjalan secara optimal.

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana preventif jangka panjang untuk membangun budaya antikorupsi. Pendidikan tidak hanya menjadi wahana transfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter bangsa. Salah satu bentuk pendidikan karakter yang sangat relevan dengan isu korupsi adalah pendidikan anti-korupsi, yang bertujuan untuk membentuk individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kebangsaan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi media yang tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam pembelajaran. PKn tidak hanya membahas hak dan kewajiban warga negara serta sistem pemerintahan, tetapi juga menekankan pembentukan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang bermoral dan berintegritas. Melalui PKn, siswa dapat dikenalkan pada nilai-nilai dasar antikorupsi seperti kejujuran, tanggung

jawab, keadilan, kepedulian, dan keberanian moral. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui pendekatan pembelajaran tematik, diskusi isu sosial, studi kasus, dan refleksi moral.

Namun, dalam praktiknya, implementasi pendidikan anti-korupsi dalam pembelajaran PKn di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan modul pembelajaran tematik, rendahnya kesiapan guru dalam mengelola isu-isu sosial yang kompleks, serta belum optimalnya evaluasi afektif dan karakter menjadi kendala utama. Selain itu, belum adanya sinergi yang kuat antara kebijakan pendidikan nasional dan pelatihan guru juga berpengaruh terhadap efektivitas pendidikan karakter di sekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pendidikan anti-korupsi dapat diterapkan melalui pembelajaran PKn. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan studi pustaka, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan. Dengan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model atau pendekatan pembelajaran yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah menengah.<sup>1</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji konsep, penerapan, serta tantangan pendidikan anti-korupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan data konseptual dan temuan-temuan yang sudah ada.

Sumber data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari :

1. Buku-buku ilmiah yang membahas tentang pendidikan anti-korupsi, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter.
2. Jurnal-jurnal akademik, baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan tema korupsi, pendidikan nilai, dan strategi pengajaran.

---

<sup>1</sup> Surya Dharma dan Lukman Hakim, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 25.

3. Dokumen kebijakan dan regulasi, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dokumen kurikulum nasional, dan publikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.
4. Sumber lainnya yang mendukung, seperti hasil seminar, laporan lembaga riset, dan artikel ilmiah populer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi kata kunci seperti “pendidikan anti-korupsi”, “pendidikan kewarganegaraan”, “nilai karakter”, dan “integritas siswa”, kemudian menelusuri literatur melalui perpustakaan fisik maupun digital seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan portal jurnal dari lembaga pendidikan tinggi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan: (1) reduksi data, yaitu pemilihan informasi yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk naratif dan tematik; serta (3) penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proses analisis dilakukan dengan memperhatikan keakuratan sumber, relevansi isi, dan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pendidikan anti-korupsi dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan pendekatan studi pustaka ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di sekolah.

## **HASIL PENELITIAN**

Kajian pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki potensi besar dalam menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada peserta didik di jenjang pendidikan menengah. PKn, yang memiliki fokus pada pembentukan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan bermoral, dapat menjadi media efektif dalam menyampaikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, keadilan, serta keberanian moral.<sup>2</sup> Nilai-nilai tersebut merupakan inti dari pendidikan karakter yang sangat diperlukan untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini.

---

<sup>2</sup> Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 147.

Nilai kejujuran misalnya, sangat relevan untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan sebagai dasar integritas pribadi. Ketika siswa dibiasakan untuk bersikap jujur dalam proses belajar mengajar, seperti tidak mencontek saat ujian atau tidak memalsukan tugas, maka mereka mulai membentuk kesadaran moral yang kuat. Begitu pula dengan nilai tanggung jawab, yang dapat ditumbuhkan melalui tugas-tugas akademik dan kegiatan organisasi siswa. Sedangkan nilai kepedulian sosial dan keadilan dapat diasah melalui pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan diskusi tentang persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.<sup>3</sup>

Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual dan reflektif dalam PKn sangat mendukung internalisasi nilai-nilai anti-korupsi. Guru dapat memanfaatkan studi kasus dari peristiwa korupsi yang nyata untuk dianalisis bersama siswa. Kasus-kasus tersebut tidak hanya memperkenalkan bentuk-bentuk korupsi kepada siswa, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, empati, dan sikap etis terhadap persoalan sosial.<sup>4</sup> Beberapa sekolah yang telah mengintegrasikan metode ini melaporkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, hasil kajian pustaka juga menyoroti berbagai tantangan dalam penerapan pendidikan anti-korupsi melalui PKn. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya pembelajaran yang secara khusus mengarah pada penguatan nilai antikorupsi. Buku teks yang digunakan dalam PKn sering kali hanya menyisipkan materi antikorupsi secara umum tanpa adanya panduan yang konkret untuk penerapan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, banyak guru PKn belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi secara efektif.

Permasalahan lainnya muncul dari aspek lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya mencerminkan budaya integritas. Masih terdapat praktik-praktik tidak etis di lingkungan sekolah seperti pungutan liar yang dilakukan secara terselubung, ketidaktepatan dalam pelaporan keuangan, atau kurangnya keteladanan dari pihak sekolah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Situasi ini menjadi ironi ketika sekolah mengajarkan nilai kejujuran dan antikorupsi, tetapi tidak mampu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Surya Dharma dan Lukman Hakim, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 58–60.

<sup>4</sup> Ahmad Satori, “Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter Antikorupsi”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 6, No. 2 (2016): 215–218.

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Integritas untuk Guru*, Jakarta: KPK RI, 2018, hlm. 22–23.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian pustaka ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi melalui PKn bukan hanya perlu dikembangkan dari sisi kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga dari sisi penguatan kapasitas guru dan pembentukan budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai antikorupsi. Penanaman nilai-nilai tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan kontekstual agar dapat membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab kebangsaan dalam memberantas korupsi di masa depan.

## **PEMBAHASAN**

Upaya penanaman nilai-nilai anti-korupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas. PKn sebagai mata pelajaran inti dalam sistem pendidikan nasional tidak hanya mengajarkan aspek kognitif tentang ketatanegaraan, konstitusi, dan demokrasi, tetapi juga memainkan peran sentral dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Melalui PKn, pendidikan tidak hanya diarahkan untuk membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang tangguh secara moral.

### **1. PKn sebagai Medium Pembentukan Nilai Anti-Korupsi**

PKn memiliki karakteristik pedagogis yang relevan untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang tidak hanya memahami aturan hukum dan konstitusi, tetapi juga mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika publik. Hal ini sesuai dengan semangat pendidikan karakter yang menekankan pada penguatan nilai-nilai luhur dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, PKn dapat digunakan sebagai wahana untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian moral, dan keadilan.

Nilai kejujuran, misalnya, dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang menekankan pentingnya menyampaikan pendapat tanpa manipulasi, menyusun laporan yang sesuai dengan fakta, dan mengakui kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tanggung jawab dapat dibentuk melalui tugas-tugas kelompok, kegiatan proyek, serta evaluasi diri yang menuntut partisipasi aktif siswa secara etis. Keberanian moral, yang merupakan aspek penting dalam perlawanan terhadap korupsi, dapat ditumbuhkan dengan memberikan ruang

kepada siswa untuk menyampaikan kritik konstruktif terhadap ketidakadilan yang mereka temui di lingkungan sekolah maupun masyarakat.<sup>6</sup>

Penanaman nilai-nilai tersebut tidak bersifat teoritis semata, tetapi harus dibarengi dengan pembiasaan dan keteladanan. Guru PKn diharapkan dapat menjadi model peran (role model) yang mencerminkan integritas, konsistensi, dan etika profesional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan, melainkan harus diperlihatkan dalam tindakan nyata oleh para pendidik.

## **2. Pendekatan Pembelajaran yang Mendukung Internalisi Nilai**

Agar penanaman nilai-nilai anti-korupsi lebih efektif, pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam PKn harus mampu menjembatani antara pengetahuan teoritis dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Beberapa pendekatan yang dianggap efektif antara lain:

- 1) Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning): Dalam pendekatan ini, guru mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi sosial aktual yang sedang terjadi. Misalnya, membahas kasus-kasus korupsi lokal atau nasional yang ramai diberitakan media, kemudian mengajak siswa untuk menganalisis penyebab, dampak, serta solusi terhadap kasus tersebut.<sup>7</sup> Hal ini menumbuhkan empati dan kepekaan siswa terhadap persoalan bangsa.
- 2) Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning): Metode ini mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata, seperti bagaimana mencegah praktik pungli di lingkungan sekolah. Dalam proses ini, siswa belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan mencari solusi yang beretika.
- 3) Pembelajaran Partisipatif dan Kolaboratif: Melibatkan siswa dalam simulasi, debat publik, sidang mini, atau proyek advokasi antikorupsi di sekolah. Misalnya, membentuk “Duta Antikorupsi” di antara siswa untuk melakukan kampanye kesadaran integritas.

Pendekatan-pendekatan tersebut menciptakan ruang yang mendorong internalisasi nilai bukan hanya di tingkat kognitif, tetapi juga afektif dan konatif (kemauan untuk bertindak).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wahab, Abdul Aziz, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 113.

<sup>7</sup> Dharma, Surya & Hakim, Lukman, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 67.

<sup>8</sup> Satori, Ahmad, “Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter Antikorupsi”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 6, No. 2 (2016): 215–218.

### 3. Realitas dan Tantangan Implementasi

Di balik potensi besar yang dimiliki, implementasi pendidikan anti-korupsi melalui PKn tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, tantangan dari sisi kurikulum dan bahan ajar. Masih banyak sekolah yang belum memiliki perangkat ajar yang secara khusus dan sistematis memuat tema anti-korupsi. Materi sering kali disisipkan secara implisit, tanpa arah yang jelas dan konsisten. Buku teks PKn nasional pun belum banyak yang mengembangkan topik ini secara mendalam.

Kedua, dari sisi pendidik, banyak guru PKn belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal pendidikan nilai, terutama dalam konteks antikorupsi. Padahal, keberhasilan pendidikan karakter sangat tergantung pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara reflektif dan dialogis, serta membangun hubungan pembelajaran yang manusiawi dan etis.

Ketiga, dari sisi lingkungan sekolah, praktik antikorupsi belum sepenuhnya menjadi budaya kolektif. Di beberapa sekolah masih ditemukan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas, seperti pungutan tidak resmi, ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan, atau pemilihan OSIS yang sarat manipulasi.<sup>9</sup> Ketika siswa menyaksikan kontradiksi antara apa yang diajarkan dan apa yang dipraktikkan, mereka berpotensi mengalami krisis moral atau bahkan menjadi apatis terhadap nilai yang diajarkan.

### 4. Sinergi dan Peran Multipihak

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, dinas pendidikan, hingga lembaga negara seperti KPK. Pelatihan guru harus menjadi prioritas agar mereka mampu merancang pembelajaran yang kontekstual dan transformatif. Sekolah juga harus diberi panduan praktis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan internal, baik melalui regulasi internal, sistem penghargaan bagi praktik integritas, maupun sanksi terhadap pelanggaran etika.

Selain itu, integrasi pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran PKn. Mata pelajaran lain seperti Agama, Bahasa Indonesia, dan IPS juga dapat mengambil peran dalam memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pendekatan lintas kurikulum (*cross-curricular approach*). Pendekatan holistik seperti ini akan memperkuat pesan moral dan

---

<sup>9</sup> komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Integritas untuk Guru*, Jakarta: KPK RI, 2018, hlm. 22–23.

menghindarkan siswa dari melihat antikorupsi sebagai isu sektoral yang hanya “tugas guru PKn”.<sup>10</sup>

Akhirnya, pembentukan karakter antikorupsi melalui pendidikan bukanlah proses instan, tetapi membutuhkan kesinambungan dan keteladanan. Sekolah yang mampu menjadi komunitas moral—bukan sekadar tempat transfer ilmu—akan lebih mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki keberanian untuk menolaknya dalam kehidupan nyata.

## KESIMPULAN

Integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun fondasi karakter generasi muda Indonesia yang bermartabat, berintegritas, dan sadar hukum. Di tengah tantangan bangsa yang masih bergelut dengan persoalan korupsi yang sistemik, pendidikan menjadi benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai moral yang dapat mencegah tumbuhnya perilaku koruptif sejak dini.

PKn sebagai mata pelajaran yang membahas aspek kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan keberanian moral. Melalui kurikulum PKn, siswa diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, serta etika dalam kehidupan publik. Materi-materi ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi landasan untuk memahami mengapa korupsi merupakan pelanggaran terhadap hukum, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Proses internalisasi nilai anti-korupsi dalam pembelajaran tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan kognitif yang bersifat informatif. Nilai-nilai tersebut harus diajarkan melalui metode yang partisipatif, reflektif, dan kontekstual agar siswa tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu merasakan pentingnya nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti studi kasus, simulasi peran, diskusi kritis, dan proyek sosial terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan sensitivitas siswa terhadap persoalan integritas dan korupsi.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya pelatihan guru tentang pendidikan nilai dan pendidikan karakter membuat proses pembelajaran cenderung

---

<sup>10</sup> KPK, *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Satuan Pendidikan*, Jakarta: KPK RI, 2019, hlm. 35.

berhenti pada penyampaian materi tekstual. Belum tersedianya buku ajar atau modul khusus yang mengarahkan guru untuk mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi secara terstruktur menjadi hambatan tersendiri. Di sisi lain, lingkungan sekolah yang belum mencerminkan budaya integritas secara menyeluruh, seperti masih adanya praktik pungutan tidak resmi, pemilihan pengurus OSIS yang tidak transparan, atau ketidakadilan dalam sistem reward and punishment, membuat siswa sulit menginternalisasi nilai yang diajarkan.

Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi melalui PKn memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari penyusun kebijakan pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua dan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas. Pendidikan nilai, termasuk anti-korupsi, tidak bisa dijalankan hanya oleh satu mata pelajaran atau satu orang guru saja. Diperlukan komitmen kolektif seluruh civitas sekolah untuk menjadi teladan dan menciptakan budaya sekolah yang jujur, adil, dan akuntabel. Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga perlu dikembangkan lintas kurikulum dengan melibatkan mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Sosial, sehingga nilai-nilai tersebut tidak dianggap eksklusif milik PKn. Pendekatan lintas mata pelajaran akan memperkuat pesan moral yang diterima siswa serta mengurangi potensi disonansi kognitif antara pelajaran yang mereka terima dengan realitas yang mereka hadapi di luar kelas.

Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi bukanlah upaya yang bersifat tambahan atau pelengkap semata, tetapi merupakan bagian integral dari pendidikan karakter dan pembangunan bangsa. Melalui integrasi yang kuat, konsisten, dan reflektif dalam PKn, kita dapat berharap lahirnya generasi penerus bangsa yang tidak hanya memahami pentingnya memberantas korupsi, tetapi juga memiliki komitmen pribadi untuk menolak dan melawannya dalam kehidupan nyata.

## **DAFTAR PUTSAKA**

- Dharma, Surya & Hakim, Lukman. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: KPK RI, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Panduan Integritas untuk Guru*. Jakarta: KPK RI, 2018.
- Mulyasa, E. (2013). *Pembangunan dan implementasi kurikulum*. Remaja Rosdakarya

Satori, Ahmad. "Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter Antikorupsi." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 6, No. 2 (2016): 215–228.

Wahab, Abdul Aziz. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.